

## **Progressivism, Collegialism and Autonomy in Muhammadiyah: Threats and Solution**

**Fantika Febry Puspitasari<sup>1</sup>, Supriyanto<sup>2</sup>, Ahmad Sulaiman<sup>2\*</sup>**

<sup>1</sup> Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Indonesia

\*corresponding email: [sulaiman\\_ahmad@umm.ac.id](mailto:sulaiman_ahmad@umm.ac.id)

DOI: [10.31603/cakrawala.4066](https://doi.org/10.31603/cakrawala.4066)

---

### **ABSTRACT**

**Keywords:**  
*Progressivism;*  
*Collegialism;*  
*Autonomy;*  
*Muhammadiyah*

*Muhammadiyah is one of the world's largest Islamic movement organizations, contributing to a variety of important areas of life for Indonesians. Muhammadiyah promotes three main characteristics based on community development: progressiveism, collegialism, and autonomy. Unfortunately, as Islamic populism grew stronger, Muhammadiyah became engulfed in a political vortex, endangering the stability of its cadres and giving the public the impression that the government could control the organization. This article evaluates the threats that cause these values to deteriorate and offers treatment options. The solutions offered to maintain the principles of progressiveism, collegialism, and autonomy are to rejuvenate the leadership, build distance from politics, develop community funds, and build supporting business units, according to literature studies and observations in several areas. Furthermore, political education as an effort to formulate political theology for Muhammadiyah members is required so that the big ship of Muhammadiyah does not become divided due to differences in political views and can increasingly contribute to politics at the local-national level without jeopardizing its integrity as a movement organization.*

---

### **ABSTRAK**

**Article Info:**  
*Submitted:*  
05/10/2020  
*Revised:*  
15/12/2020  
*Published:*  
30/12/2020

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi gerakan Islam terbesar di dunia yang berkontribusi dalam berbagai lini penting kehidupan masyarakat Indonesia. Berbasis pengembangan komunitas di masyarakat, Muhammadiyah juga memupuk tiga karakter utama, yaitu progresifisme, kolegalisme dan otonomi. Sayangnya, bersamaan dengan menguatnya populisme Islam, Muhammadiyah mulai tertarik ke dalam pusaran politik yang mengancam kesolidan kadernya dan memberi persepsi publik bahwa terdapat ruang untuk pemerintah dalam mengendalikan organisasi ini. Tulisan ini mengulas ancaman yang memungkinkan pudarnya nilai-nilai itu dan memberi solusi untuk merawatnya. Melalui studi literatur dan observasi pada beberapa wilayah, solusi yang ditawarkan untuk mempertahankan prinsip progresifisme, kolegalisme dan otonomi adalah melakukan peremajaan pimpinan, membangun jarak dengan politik dan kekuasaan, mengembangkan dana komunitas, dan membangun unit-unit bisnis penopang. Selain itu, pendidikan politik sebagai upaya merumuskan teologisasi politik bagi warga Muhammadiyah juga dibutuhkan supaya kapal besar Muhammadiyah tidak terbelah karena perbedaan sikap politik

---

dan semakin mampu berkontribusi kepada politik dalam aras lokal-nasional tanpa mengorban integritas sebagai organisasi gerakan.

---

## PENDAHULUAN

Muhammadiyah merupakan salah satu dari organisasi Islam terbesar di Indonesia bahkan dunia. Anggota Muhammadiyah tersebar di seluruh penjuru negeri hingga ke benua Eropa, Amerika, Afrika dan Asia. Dengan melimpahnya omset kekayaan yang dimilikinya, Muhammadiyah sering dibandingkan dengan negara dimana ia bernaung. Hingga timbul pernyataan bahwa Muhammadiyah layaknya negara di dalam negara dalam konteks kepemilikan Amal Usahanya (Nurmandi & Qodir, 2015). Tercatat hingga kini Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), antara lain: 4.623 TK/TPQ, 2.604 SD/MI, 1.772 SMP/MTs, 1.143 SMA/SMK/MA, 67 Pondok Pesantren, 172 Perguruan Tinggi, 457 pusat-pusat kesehatan seperti poliklinik dan rumah sakit, 318 panti asuhan, 54 panti jompo, 52 rehabilitasi cacat, 71 SLB, 6.118 masjid, 5.080 Mushola, 20.945.504 m<sup>2</sup> tanah dan 565 BMT serta lembaga mikro lainnya. Nilai dan sebaran aset Muhammadiyah yang luar biasa itu merupakan bukti kebesaran Muhammadiyah sehingga ia patut diperhitungkan (Syaifuddin et al., 2019). Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang besar, inklusif dan berdedikasi untuk membesarkan bangsanya.

Hal yang kadang luput dari pengamatan kita adalah bahwa kebesaran Muhammadiyah tidak terlepas dari adanya budaya progresifisme, kolegialisme dan otonomi para pimpinan dan anggota Muhammadiyah mulai dari tingkat ranting hingga pusat. Progresifisme atau berkemajuan adalah wajah utama Muhammadiyah yang menekankan pembaharuan melalui modernisasi metode pengelolaan organisasi tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Dikenal dalam sejarah, bahwa Muhammadiyah yang pertama mengadopsi bangku, kursi dan sistem sekolah milik barat. Muhammadiyah juga yang melembagakan suatu badan sosial yang memberdayakan umat melalui Penolong Kesejahteraan Oemat (PKO). Ketika organisasi lain fokus kepada pesantren, Muhammadiyah justru berekspansi lewat universitas-universitas. Fakta itu mendapuk Muhammadiyah sebagai ormas yang terdepan dalam inovasi gerakan. Muhammadiyah juga sebagai sebuah gerakan anti kemapanan, maknanya ia tidak akan pernah merasa puas dengan capaian sejauh ini. Inovasi selalu dilakukan demi memantapkan Muhammadiyah sebagai organisasi modern yang progresif.

Tidak hanya progresifisme, kolegialisme juga merupakan nilai inti gerakan di Muhammadiyah. Kolegialisme merujuk pada budaya organisasi yang menjunjung kesetaraan antara seluruh anggota tanpa melihat latar belakang sosial-ekonomi dan nasabnya (Pilkington et al., 2001). Kolegialisme menyebabkan seluruh anggota turut berpartisipasi aktif, tidak hanya patron-patron atau elite tertentu sebagaimana umum di ormas Islam lain. Kolegialisme juga menjadikan keberadaan anggota Muhammadiyah sebagai sel-sel yang terus beregenerasi dan menyuplai yang menghidupi AUM ketimbang sekedar aset yang membutuhkan pemeliharaan dan sebagai objek semata

(Harvey, 1995). Nilai Kolegialisme dalam Muhammadiyah merupakan alternatif atas dominasi gaya manajemen yang kaku dan nampak tidak kompatibel dengan karakter sosiologis orang Indonesia yang kolektif dan berorientasi kepada amalan nyata (Marini & Reale, 2016). Kolegialisme itulah yang menjadi fondasi dasar penyangga bangunan besar Muhammadiyah dan AUMnya.

Sementara yang tidak kalah penting berikutnya adalah budaya otonomi dalam Muhammadiyah. Nilai otonomi atau kemandirian dalam mengatur dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi adalah salah satu asas pokok dalam AUM. Otonomi memberi jarak kepada kepentingan-kepentingan jangka pendek yang seringkali memanfaatkan institusi-institusi Pendidikan (Maassen et al., 2017). Nilai otonomi telah memungkinkan Muhammadiyah untuk secara kreatif dan akseleratif menjawab tantangan-tantangan organisasi tanpa kekhawatiran untuk disetir oleh aktor-aktor luar. Tanpa ketiga sifat itu, Muhammadiyah akan layu sebelum berkembang bagaikan organisasi gerakan Islam lain di Indonesia yang dulu cukup berpengaruh dan tercatat dalam sejarah Indonesia, misalnya Boedi Utomo dan Serikat Islam.

Budaya urunan, misalnya, adalah satu diantara praktik dari kolegialisme dan otonomi. Melalui urunan para anggota berkontribusi sesuai kemampuan untuk mendirikan dan membesarkan sebuah amal usaha. Budaya ini menyebabkan Muhammadiyah relatif *survive* ketimbang organisasi gerakan lain. Sedari awal Muhammadiyah menisbahkan diri sebagai organisasi yang mandiri yang menjadi *partner* sejajar alih-alih disubordinasi pemerintah (Nurmandi & Qodir, 2015).

Namun demikian, memasuki abad kedua usia Muhammadiyah, budaya kolegialisme dan otonomi Muhammadiyah mengalami gelombang ujian yang cukup besar. Persoalan pandangan politik datang menguji budaya kolegialisme dan otonomi yang dibangun selama ini. Tidak jarang ditemukan AUM seperti sekolah dan kampus disulap menjadi ruang politik yang memberi tempat bagi politikus dan tim sukses yang mengaku Muhammadiyah untuk tampil mengampanyekan visi-misi dan programnya. Mereka memanfaatkan keluasan jaringan pendidikan Muhammadiyah yang tersebar di berbagai wilayah di sebuah kota, provinsi atau bahkan di nusantara. Masalahnya, gejala tidak mungkin dihindari ketika perbedaan pilihan terjadi. Konflik internal akibat gejala itu sering kali justru membuat AUM menghabiskan sumber daya mereka untuk menyelesaikan konflik, alih-alih berkonsentrasi kepada operasional bisnis AUM.

Secara kritis, kita bahkan dapat mengatakan bahwa Muhammadiyah saat ini mengalami stagnasi. Sebab jika dilihat dan dirasakan, gerakan dakwah Muhammadiyah pada masa awal hingga kini ternyata tidak jauh berbeda. Pimpinan Muhammadiyah hanya mereplika apa yang oleh pendirinya, Kiai Dahlan telah mulai. Terlebih lagi pada era pasca-reformasi, Muhammadiyah seperti hanya disibukkan dengan berbagai platform lama amal usaha (sekolah, rumah sakit, pondok pesantren, perguruan tinggi, dan sebagainya) dan sedikit beranjak terhadap alternatif platform yang kekinian (e.g. *start-up*, aplikasi, atau digitalisasi) (Nurmandi & Qodir, 2015).

Nampaknya, hal ini terjadi karena pergeseran nilai di alam pikiran Muhammadiyah. Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) khususnya di bidang pendidikan mengalami kecenderungan berpuas diri. Muhammadiyah seolah sudah ‘cukup’ dan tidak memiliki urgensi untuk melakukan terobosan-terobosan. Masyarakat pun mulai melihat Muhammadiyah bukan lagi gerakan pembaharuan dan visi ‘Islam Berkemajuan’ sekedar slogan kosong.

Muhammadiyah tampak pula mulai bergantung diri terhadap pemerintah ataupun partai politik tertentu. Ketergantungan itu terlihat, misalnya, saat pengadaan sarana pendidikan seperti gedung, bangku sekolah, komputer, alat tulis menulis, penggajian karyawan dan seterusnya yang menarget dana-dana hibah pemerintah. Persoalan seperti ini sesungguhnya pada masa awal pendirian Muhammadiyah diselesaikan dengan budaya urunan anggota yang kemudian itu berdampak secara langsung terhadap kuatnya budaya kolegalisme anggota dan otonomi AUM tersebut. Namun kini nampaknya budaya luhur itu kian tergerus bahkan tak jarang ditemui di beberapa daerah pendiri AUM yang berkonflik dengan para guru, karyawan dan pengurus AUM.

Dari paparan di atas muncul dua pertanyaan yang akan menjadi fokus dari penelitian ini. Pertama, apakah faktor yang mengancam budaya progresifisme, kolegalisme dan otonomi AUM bidang pendidikan? Kedua, bagaimana langkah atau solusi yang dapat ditempuh Muhammadiyah untuk mempertahankan budaya progresifisme, kolegalisme dan otonomi yang dimiliki selama ini?

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dan observasi. Tim peneliti mengidentifikasi, mentabulasi, membaca dan melakukan refleksi atas data-data yang dihimpun dari literatur. Tim peneliti menggunakan mesin pencari Google Scholar untuk menemukan literatur yang relevan dan dapat menjadi bahan studi pustaka. Tim Peneliti juga melakukan observasi di beberapa sekolah dan perguruan tinggi untuk mengumpulkan data. Adapun titik observasi tersebar utamanya di empat kota/kabupaten, yaitu Malang, Surakarta, Ponorogo dan Ngawi.

Data yang telah terhimpun kemudian dianalisis secara tematik. Tema diproduksi dengan melihat satu kategori yang paling mewakili data-data yang saling berhubungan dan berulang. Tema-tema yang telah diproduksi, kemudian didiskusikan untuk menentukan tema akhir yang disepakati. Tema-tema yang mirip akan digabungkan dengan memberi nama tema yang lebih mencakup tema-tema yang dileburkan. Adapun tema-tema yang sudah sejalan akan diterima karena dipandang telah terdapat konsensus. Tema-tema khusus yang ditemukan oleh hanya satu peneliti akan dibahas untuk disepakati apakah layak berdasar ketersediaan data-data yang membangun tema tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Faktor-faktor yang mengancam progresifisme, kolegalisme dan otonomi Muhammadiyah

#### 1. Ancaman dari ambiguitas teologi politik Muhammadiyah

Di tubuh Muhammadiyah, telah lama terjadi silang pandangan dalam merumuskan teologi politik Muhammadiyah. Tafsir mengenai pemikiran pendirinya dan pemikir Muhammadiyah kontemporer terhadap hubungan persyarikatan dengan politik sejauh ini belum menemukan konsensus (Prihantoro, 2017). Persoalan mendasar ini kemudian berdampak pada munculnya perdebatan cukup panas dalam kalangan internal Muhammadiyah mengenai hubungan paling ideal antara Muhammadiyah dengan kekuasaan (politik). Absennya konsep ini, membuat Muhammadiyah terlihat gagap dalam menyikapi dinamika politik (Nashir, 2006).

Sayangnya, harus diakui bahwa sejauh ini teologi politik Muhammadiyah belum ada perumusan secara konkret dan tegas (Nurmandi & Qodir, 2015). Sikap politik ditafsiri dari perspektif sendiri-sendiri, artinya belum ada sikap tegas yang terorganisasi. Bahkan dari Muktamar satu ke Muktamar lainnya, hal ini selalu menjadi perdebatan. Misalnya, hasil sidang Tanwir di Ponorogo tahun 1969 atau dikenal dengan “Khittah Perjuangan” Muhammadiyah secara tegas menunjuk konsep “politik praktis” sebagai bagian dari dakwah amar *Ma'ruf Nahi Munkar* dalam bidang kenegaraan. Sedangkan dalam Khittah Muktamar ke-38 tahun 1971 di Ujung Pandang dan Muktamar Denpasar Tahun 2002 menyatakan asas netralitas Muhammadiyah dalam panggung politik. Hubungan Muhammadiyah dan politik cukup dinamis, jika diibaratkan sebuah pernikahan maka Muhammadiyah memiliki 3 model pernikahan. Pertama “pernikahan resmi” saat beberapa pengurus Muhammadiyah menjadi yang anggota istimewa partai Masyumi pada era awal kemerdekaan, kedua “pernikahan siri” saat Muhammadiyah menginisiasi tanwir Ponorogo. Ketiga pernikahan mut’ah (kontrak) saat pendirian PAN pada era awal reformasi yang akhirnya “bercerai” karena keputusan tanwir Denpasar pada tahun 2002 (Sholikin, 2020).

Dinamika hubungan keduanya berdampak pada terjadinya persilangan pendapat dari para tokoh Muhammadiyah yang saling menafsirkan hubungan paling ideal antara keduanya. Diskursus itu dapat dilihat adalah dari kritik beberapa tokoh Muhammadiyah atas semboyan ‘Muhammadiyah tidak kemana-mana tapi ada dimana-mana’ (Nurmandi & Qodir, 2015). Kritik tersebut merujuk pada fakta bahwa selama ini meskipun Muhammadiyah ada dimana-mana, namun Muhammadiyah tidak begitu signifikan dalam memainkan peran dalam kancah politik nasional. Malahan, lebih sering Muhammadiyah hanya menjadi objek politik saja. Hal itu dapat dilihat dari persoalan wujud keterlibatan kader Muhammadiyah dalam dinamika perpolitikan nasional yang masih sarat

ambiguitas atau kegamangan. Perlukah Muhammadiyah mengerahkan kader dan sumber daya di Amal Usaha untuk mendukung kadernya? Atau cukupkah Muhammadiyah bersikap netral sekalipun kandidat yang sedang bertarung adalah kader ideologisnya? (Husin, 2001).

Mantan Ketua Umum Muhammadiyah, Syafi'i Ma'arif mengajukan pertanyaan yang tidak kalah kritis: apakah Muhammadiyah akan tetap hanya sebagai “pembantu negara” atau mau bergerak lebih jauh untuk juga sebagai “penentu perjalanan negara Indonesia”? Untuk menjawab pertanyaan itu, menurutnya teologi politik Muhammadiyah harus dirumuskan kembali. Apakah Muhammadiyah akan tetap menjaga jarak dengan politik atau lebih jauh mengambil langkah berani seperti yang ditawarkan Thohari dengan menjadikan politik sebagai Amal Usaha baru Muhammadiyah?

Secara tegas Haedar Nashir dalam bukunya, “Dinamika Politik Muhammadiyah” memaparkan pandangan-pandangan pribadinya yang bertitik-tolak pada pengalaman sejarah panjang Muhammadiyah dengan politik yang dilalui selama kurun waktu lebih dari se-abad. Yang menarik, berdasar telaah historis, perumusan teologi politik Muhammadiyah menjadi perdebatan yang tak pernah usang. Tokoh Muhammadiyah era kemerdekaan, Ki Bagus Hadikusumo sebagaimana yang ditulis dibukunya yang berjudul “Islam Dasar Negara dan Akhlaq Pemimpin” secara garis besar menawarkan gagasan tentang membangun negara di atas dasar ajaran Islam (Nashir, 2006). Pandangan konsep ber-negara yang dibawa oleh Ki Bagus secara umum berbeda dengan pikiran Amien Rais, yang melalui PAN hendak mengatakan bahwa konsep dasar negara adalah nasionalisme bukan negara berbasis Islam sehingga mendorong perjuangan politik yang inklusif (Asyari, 2015). Meski pemikiran keduanya memiliki tempat yang tinggi dalam kesadaran warga Muhammadiyah, namun pemikiran beliau berdua masih bersifat personal sehingga belum mewakili Muhammadiyah secara kelembagaan.

## **2. Terseret oleh diaspora kader Muhammadiyah**

Meskipun Muhammadiyah bukan gerakan politik, namun sering kali Muhammadiyah nampak terlibat langsung dan terbuka dalam aktivitas politik. Keterlibatan tersebut memang bukan atas nama persyarikatan melainkan gerakan individu (anggotanya), namun demikian mereka tidak bisa serta merta melepas atribut persyarikatan yang menempel dalam dirinya (Nurmandi & Qodir, 2015). Akan tetapi Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada para anggotanya untuk berkiprah dalam organisasi politik yang sah, baik sebagai oposisi maupun koalisi (Husin, 2001). Kondisi yang demikian berdampak pada munculnya fenomena rangkap jabatan di tubuh Muhammadiyah khususnya tingkat daerah, cabang dan ranting. Banyak ditemukan tokoh Muhammadiyah yang menjabat

struktural (Pimpinan Ranting, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah) juga menjabat di kepartaian bahkan ada Pimpinan Sekolah Muhammadiyah yang juga menjadi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) salah satu Partai politik. Hal itu tentu berdampak pada munculnya kecenderungan rasa ketergantungan sekolah terhadap partai politik. Di satu sisi kepala sekolah harus menjaga idealisme persyarikatan yakni tetap menjaga jarak dengan kekuasaan, namun di sisi lain mereka harus menjaga hubungan baik dengan kekuasaan (eksekutif/legislatif) supaya sekolahnya mendapat bantuan pembangunan ataupun bentuk lain. Selama ini ada upaya Muhammadiyah untuk mendorong aktivisnya menempati jabatan-jabatan strategis karena dianggap hal itu merupakan langkah untuk menangkal kekuatan “anti-Islam” (Mulkhan, 2010). Artinya sebetulnya Muhammadiyah begitu tertarik dalam politik praktis hanya saja masih bersikap “malu-malu”.

Melihat perdebatan yang terjadi di kalangan warga Muhammadiyah menyebabkan hingga saat ini belum ada keputusan yang mengikat berkenaan dengan sikap warga Persyarikatan dalam berpolitik. Akibatnya, muncul guncangan cukup kuat di tubuh persyarikatan, mulai dinamika yang konstruktif hingga yang destruktif. Bahkan dalam pilpres sempat terjadi tindakan ‘saling mengkafirkan’ antar-kader Muhammadiyah. Kapal besar Muhammadiyah seolah terbelah. Dalam pandangan penulis, pecahnya kapal besar ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Misalnya, telah tumbuh *distrust* kepada sesama kader yang berbeda pilihan yang menyebabkan kesulitan diantara kader itu untuk bekerja sama. Tentu hal ini telah menggerus kolegalisme di dalam tubuh Muhammadiyah. Kondisi semacam ini begitu nampak pada perhelatan Pemilu 2019, khususnya pada kontestasi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Di sana terjadi polarisasi dukungan dari elite Muhammadiyah (dukungan kepada Joko Widodo dan Prabowo Subianto). Meskipun sebetulnya secara tegas PP Muhammadiyah memilih “jalan tengah” dalam percaturan politik. Muhammadiyah tidak ingin menjadi bagian dari dukung-mendukung pasangan tertentu karena bagi Muhammadiyah berfokus pada persoalan bangsa jauh lebih penting ketimbang mempersoalkan pelabuhan mana yang hendak dituju oleh kapal besar Muhammadiyah (Nashir et al., 2019).

Sementara itu, PP Muhammadiyah masih kuat pendirian dengan sikap akomodatif yang selama ini dianggap menjadi budaya politik Muhammadiyah. Belum adanya pendidikan politik persyarikatan menjadi persoalan tersendiri sebab kedewasaan berpolitik warga Muhammadiyah memang belum merata. Oleh karenanya perlu adanya ketegasan gagasan di tubuh Muhammadiyah dalam bidang politik. Apakah mengambil putusan seperti Jammaludin Al Afghani untuk menjadi bagian dari politik praktis, atau mengambil sikap radikal seperti pemikiran Sayyid Qutub atau Rasyid Ridha tentang konsep negara Islam atau

Muhammadiyah tetap ber-imam kepada pemikiran Muhammad Abduh dengan berfokus kepada pembangunan manusia melalui jalur pendidikan (Taufik et al., 2005). Dalam hal ini, perlu adanya ijtihad yang mendalam oleh pimpinan pusat Muhammadiyah supaya sikap ambivalen yang selama ini terjadi di tubuh Muhammadiyah tidak lantas mentradisi, yang akhirnya berdampak kepada lunturnya prinsip kolegialisme Muhammadiyah.

### 3. Tradisi politik akomodatif Muhammadiyah

Setelah keluarnya Khittah Ujung Pandang (1971) dan Khittah Denpasar (2002), Muhammadiyah memantapkan diri sebagai organisasi non-politik serta tidak turut serta dalam politik praktis. Oleh sebagian kecil aktivis Muhammadiyah yang menginginkan agar Muhammadiyah turut serta dalam politik praktis (*low politic*), sikap ini dianggap sebagai upaya “cuci tangan” terhadap dinamika politik nasional (Nashir et al., 2019). Meskipun oleh mayoritas aktivis Muhammadiyah hal itu mendapat penolakan. Nampaknya tidak sedikit kader Muhammadiyah yang rindu untuk kembali pada politik praktis seperti halnya ketika beberapa tokoh Muhammadiyah menjadi anggota istimewa partai Masyumi pada era awal kemerdekaan. Bisa dikatakan bahwa Muhammadiyah dan Masyumi memiliki semangat yang sama dalam mendakwahkan Islam, yakni sama-sama merujuk pada Al-Qur’an dan Hadist dalam setiap derap langkahnya. Hal itu yang kemudian membuat hubungan keduanya sangat dekat (Rahman & Wulandari, 2019). Berkaca pada catatan sejarah, langkah tersebut dinilai terlalu berisiko manakala Muhammadiyah harus terlibat dalam politik praktis, karena hal itu akan berdampak pada menguatnya konflik kepentingan pada internal persyarikatan.

Sikap akomodatif Muhammadiyah bisa kita lihat pada masa Orde Baru, di bawah kepemimpinan AR Fahrudin, Muhammadiyah dianggap pasif di pentas politik Indonesia. Bahkan sebagian kalangan menilai sikapnya terlalu nampak sebagai bagian dari pemerintahan sehingga sangat minim kritik terhadap rezim kala itu. Hal itu bertolak belakang dengan pola kepemimpinan Nahdlatul Ulama pada era Orde Baru. Di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), NU nampak pasang badan memberi kritik tajam terhadap kebijakan Soeharto yang dianggap banyak melenceng dari cita-cita luhur bangsa Indonesia (Nashir, 2006). Meskipun kritikan itu lantas dijawab ketika era kepemimpinan Amien Rais, yang sangat tajam dan menjadi salah satu tokoh penting reformasi. Masalahnya, gaya kepemimpinan Amien Rais juga banyak dikritik karena dianggap tidak sesuai dengan tradisi politik Muhammadiyah.

Bertolak pada gerakan Muhammadiyah di era Orde baru, Kamal Hassan (1987) mengatakan bahwa Muhammadiyah termasuk dalam kelompok Islam Akomodasionis, di mana ia mengambil peran yang selalu berdampingan dengan pemerintahan (Nashir, 2006). Hal itu berbeda dengan peran yang dimainkan oleh



Masyumi ataupun Syarikat Islam (SI) yang selalu berhadapan dengan pemerintah. Bisa dikatakan budaya politik yang dimainkan oleh Muhammadiyah adalah pola hubungan akomodatif. Pola akomodatif yang dimainkan Muhammadiyah melalui kebijakannya tidak hitam-putih atau satu warna saja. Dalam sekali waktu Muhammadiyah bisa sangat dekat dengan pemerintah, sebut saja saat awal pendirian persyarikatan ini, Ahmad Dahlan menerima bantuan dari pemerintah Hindia-Belanda untuk pengembangan lembaga pendidikannya. Hal itu oleh beberapa kalangan dianggap tidak sejalan dengan semangat perjuangan kemerdekaan, meskipun akhirnya dibantah dengan argumentasi logis Ahmad Dahlan bahwa ini adalah uang dari rakyat maka harus dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat (Nashir, 2006).

Pun demikian pada masa pasca-kemerdekaan, Muhammadiyah terkadang terlihat begitu dekat dengan pemerintah, bahkan Soekarno mengatakan bahwa dirinya 'Makin Lama Makin Cinta dengan Muhammadiyah' dan meminta supaya dirinya tidak dihapuskan dari daftar keanggotaan Muhammadiyah. Namun di beberapa kesempatan lain, Muhammadiyah juga menampakkan ketidakcocokan dengan pemerintah Soekarno, terlebih lagi saat Presiden pertama ini begitu mesra dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang kemudian lahir gagasan tentang Nasakom (Nasionalis Agama dan Komunis).

Pola yang sama juga dilakukan oleh Muhammadiyah saat ini. Hubungan Muhammadiyah dengan pemerintahan Joko Widodo juga 'hitam-putih' seperti halnya dengan pemerintah-pemerintah sebelumnya. Terkadang Muhammadiyah nampak begitu mesra dengan pemerintahan namun terkadang memperlihatkan jaraknya. Meski lebih dominan kemesraan yang dinampakkan di ruang publik. Terlebih lagi saat Muhadjir Effendy sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah diamanahi sebagai menteri dalam kabinet Joko Widodo Jilid I dan Jilid II.

Sikap yang ditunjukkan Muhammadiyah saat ini, menurut Asyari (2015) diduga merupakan akibat dari rasa trauma pada sejarah, di mana pada tahun 1950-an ketika Muhammadiyah secara teran-terangan terlibat aktif di partai Masyumi yang kemudian berimbas pada kuatnya konflik internal (sesama elit Muhammadiyah) maupun dengan Pemerintah saat itu. Meskipun Muhammadiyah tidak pernah tercatat sebagai Partai Politik seperti halnya NU tetapi rasa trauma itu betul ada. Sehingga sampai saat ini, walaupun deras arus keinginan para kader Muhammadiyah supaya persyarikatan ini terlibat dalam percaturan politik nasional (*real politics*), baik itu berupa arahan dari PP Muhammadiyah untuk mendukung salah satu partai ataupun secara organisasi membentuk partai politik selalu menjadi diskursus yang tak berujung.

Budaya akomodatif yang dimiliki Muhammadiyah ini sesungguhnya merupakan gambaran konkret bahwa Muhammadiyah ingin cari aman dalam

sistem birokrasi. Bahkan [Mulkhan \(2010\)](#) mengatakan bahwa sikap yang demikian berakibat pada rasa *over confident* Muhammadiyah terhadap penguasa. Inginnya tidak berkeringat tetapi bisa mendapat posisi di pemerintahan Muhammadiyah saat ini memiliki kecenderungan ‘malu-malu tapi mau’ jika menyoal posisi di pemerintahan. Budaya semacam ini, dalam pandangan penulis perlu diubah, sebab akan berdampak kurang baik bagi tubuh Muhammadiyah sendiri lebih khusus bagi para pengelola AUM, khususnya bidang pendidikan. Ada semacam kegamangan sikap para pengelola sekolah Muhammadiyah, di satu sisi mereka harus mengikuti khittah Persyarikatan untuk tidak dekat-dekat dengan penguasa, namun di sisi lain mereka kesulitan ketika hanya mengandalkan ‘urutan’ para anggota Muhammadiyah. Dakwah kultural penting untuk menjaga sikap otonomi persyarikatan namun dakwah struktural juga penting untuk mengefisiensi dan akselerasi tujuan persyarikatan. Lagi-lagi pendidikan politik bagi warga Muhammadiyah perlu dilakukan dengan berlandaskan prinsip kolegialisme persyarikatan, termasuk sikap politiknya.

#### 4. Tumbuhnya hasrat berpolitik warga Muhammadiyah

Semenjak Khittah ujung pandang (1971) tentang ‘tidak terlibatnya Muhammadiyah dalam politik praktis’ dan Khittah Denpasar (2002) tentang konsep ‘mewujudkan Islam *Rahmatan Lil’Alamin* dengan selalu berpegang teguh pada asas Gerakan Dakwah *Amar Ma’ruf Nahi Mungkar*’ yang kemudian menurut [Nashir \(2006\)](#) dikatakan memiliki kecenderungan mengambil peran dalam lapangan kemasyarakatan yang bersifat pembinaan atau pemberdayaan masyarakat maupun kegiatan politik tidak langsung (*high politics*). Dengan kata lain, Muhammadiyah menyatakan bahwa dirinya tidak terikat dan mengikat dirinya dengan partai politik manapun.

Meskipun dibantah dengan mengatakan bahwa berdirinya PAN merupakan hasil ‘Ijtihad politik’ Amien Rais yang mendapat dukungan penuh dari Muhammadiyah. [Asyari \(2015\)](#) berpendapat tidak pernah sebelumnya Muhammadiyah memiliki hubungan sedemikian dekat dengan partai politik selama pemilihan umum dan pemilu presiden, hubungan ideologis itu pun masih berlangsung sampai saat ini bahwa PAN adalah partainya Muhammadiyah (stigmatisasi yang terbangun di masyarakat). Meskipun saat itu perolehan suara PAN dalam pemilu membuat sebagian besar warga Muhammadiyah dibuat kecewa sehingga berdampak pada pandangan warga Muhammadiyah tentang politik praktis ([Mulkhan et al., 2008](#)). Meski rasa traumatik itu masih ada, namun fenomena kedekatan Muhammadiyah dengan politik praktis masih berlangsung hingga kini bahkan bukan hanya dengan PAN tapi juga dengan partai politik lain. Sebut saja Dahnil Anzhar Simanjuntak (Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2015-2019) menjadi bagian dari partai Gerindra, yakni

sebagai juru bicara Prabowo (Sebagai Ketua Umum Partai dan Menteri Pertahanan RI). Sebelum Dahnil, ada sederet nama yang aktif di pengurusan partai selain PAN, antara lain : Raja Juli Anthoni (Sekretaris Jendral PSI), Ahmad Rofiq (Sekretaris Jendral Partai Perindo), Ahmad Labib (Golkar), Suyoto (Kang Yoto) mantan Bupati Bojonegoro menjadi anggota partai Nasdem setelah sebelumnya menjadi anggota PAN.

Masuknya Prof Muhadjir Effendy sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dalam Kabinet Indonesia Kerja Jilid I dan sebagai Menteri Koordinator Pembangun Manusia dan Kebudayaan (PMK) pada Kabinet Indonesia Kerja Jilid II semakin memperkuat dugaan mulai tumbuhnya hasrat berpolitik warga Muhammadiyah. Ditambah bentuk ‘ijtihad politik’ beberapa Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) terkait instruksi untuk mendukung para kadernya untuk terlibat menjadi peserta pemilu dan pilkada (DPD, DPR RI, DPRD Provinsi/ Kabupaten, Gubernur, Bupati/ Walikota) yang kemudian ijtihad tersebut berimbas pada gerakan menggalang dukungan (kampanye) oleh pimpinan di bawahnya (Pimpinan Daerah, Cabang dan Ranting) tak luput para pengelola AUM (Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan).

Dari ‘ijtihad politik’ tersebut, ada yang berhasil namun juga ada yang gagal dalam mengantarkan kadernya menduduki jabatan politik. Prof Zainudin Maliki misalnya, adalah salah satu keberhasilan ijtihad yang dilakukan oleh PWM Jawa Timur. Sementara Nadjib Hamid (Calon DPD RI) dan Suli Da’im (Calon DPRD Provinsi Jatim) adalah yang gagal dalam kontestasi pemilu serempak bulan April 2019 lalu. Yang lebih menarik adalah masifnya keterlibatan AUM bidang pendidikan terutama dalam mengambil peran sebagai pendulang suara. Bahkan beberapa perguruan tinggi dan sekolah Muhammadiyah dijadikan tempat untuk deklarasi dukungan terhadap pasangan calon Presiden Nomor Urut 01 maupun 02. Beberapa grup WhatsApp dan Facebook yang beranggotakan kader Muhammadiyah pun sangat ramai memperbincangkan kontestasi Pilpres 2019. Harus diakui bahwa pada kontestasi Pilpres tahun 2019 dalam tubuh Muhammadiyah terjadi “pecah” dukungan. Sebut saja Raja Juli, Ali Muthohirin dan sebagainya secara terbuka mendukung pasangan Joko Widodo dan Maruf Amin sementara Dahnil Anzhar dan sebagainya mendukung Prabowo - Sandiaga Uno. Fenomena pecah dukungan itu pun terjadi hingga Pimpinan Ranting Muhammadiyah.

Di beberapa daerah juga nampak betul keterlibatan warga Muhammadiyah dalam percaturan politik, contohnya pemilihan Walikota Kediri tahun 2013. Muhammadiyah dan NU bergandeng tangan memenangkan pasangan Abdullah Abubakar - Lilik Muhibbah (Edwinarta & Dwijayanti, 2016). Dalam Pilkada di Kabupaten Sleman pada tahun 2010, PDM membentuk tim sukses yang diketuai oleh Parwoto, salah satu Pimpinan PDM dan mendapat mandat dari partai Golkar

(Nurmandi & Qodir, 2015). Pun demikian dengan Pilkada Kabupaten Maros meskipun PDM tidak membentuk Tim Sukses, namun semua warga Muhammadiyah terlibat aktif. Di tahun 2014 PWM Sulawesi Selatan juga berijtihad politik untuk memenangkan Iqbal Parewangi untuk meraih kursi DPD RI setelah pada tahun 2004 dan 2009 gagal menempatkan kader terbaiknya di kursi DPD (Nurmandi & Qodir, 2015).

Melihat fenomena-fenomena keterlibatan warga Muhammadiyah di atas, dapat disimpulkan bahwa keinginan warga Muhammadiyah untuk terlibat kembali dalam politik praktis mulai tumbuh dan menguat. Memang unik gaya komunikasi politik yang dimiliki Muhammadiyah, dari yang awalnya berprinsip “menjaga jarak” dengan penguasa lantas berubah menjadi “menjaga kedekatan” dengan penguasa. Meskipun secara terang Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan bahwa Muhammadiyah tidak ingin terlibat dalam *low politics/real politics* namun politik elektoral di aras lokal mulai tingkat Pimpinan Wilayah hingga Ranting jamak terjadi, bisa dikatakan bahwa Muhammadiyah memang bukan partai politik namun ia adalah “Pemain Politik” (Nurmandi & Qodir, 2015).

## **B. Solusi untuk merawat progresifisme, kolegalisme dan otonomi**

Pada bagian ini, akan dijabarkan beberapa langkah yang dapat diambil Muhammadiyah untuk mempertahankan bahkan meningkatkan progresifisme, kolegalisme dan otonomi. Secara khusus, pada bagian ini langkah-langkah itu akan banyak dikaitkan dengan pengelolaan amal-amal usaha Muhammadiyah dalam ranah pendidikan. Hal ini mengingat amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan jumlahnya menempati posisi tertinggi dibanding ranah lainnya, betapa besar konflik kepentingan dan politik terjadi di amal usaha pendidikan dan contoh-contoh kesuksesan dari banyak amal usaha Muhammadiyah bidang pendidikan.

### **1. Peremajaan pimpinan Muhammadiyah dan pengelola AUM**

Sudah menjadi diskursus lama di tubuh Muhammadiyah bahwa terjadi kelambanan gerak Muhammadiyah. Sering diibaratkan seperti gajah tua yang gemuk, yang kesulitan bermanuver di tengah dinamika sosial budaya yang semakin cepat, Muhammadiyah dituntut untuk melakukan peremajaan. Perlu adanya perubahan mendasar di tubuh Muhammadiyah yang menyangkut paradigma, kepemimpinan, organisasi, dan strategi perjuangan (Husin, 2001). Sehingga langkah akseleratif dan progresif yang menjadi ruh persyarikatan tetap terjaga dalam diri kader Muhammadiyah.

Diskursus paling awal mengenai peremajaan Muhammadiyah dapat kita temukan dari tulisan A.R. Fahchrudin di Suara Muhammadiyah edisi 1970an (Nasri, 2010). Disitu, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah mendorong agar Muhammadiyah mendorong lebih banyak kader-kader muda Muhammadiyah untuk maju ke pentas nasional dan memegang tampuk kepemimpinan.

Mengenang masa dimana ia sendiri dulu didorong oleh mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah yang lain, H.M. Junus, Fachrudin berharap agar Muhammadiyah bisa lebih lincah dalam menghadapi lompatan-lompatan yang terjadi dalam berbagai aspek kehidupan. Utamanya, lompatan dalam hal teknologi dan ilmu pengetahuan yang sangat sulit untuk diikuti oleh generasi yang lebih tua. Anak-anak Muda juga dipandang lebih berani 'menderita' ketimbang yang tua, sehingga berani mengambil keputusan-keputusan pembaharuan. Berbeda dengan generasi tua yang cenderung berhati-hati dan lamban.

Sama halnya dengan Muhammadiyah, pengelola amal usaha juga seharusnya melakukan percepatan generasi. Sebab, anak muda lebih mampu melihat peluang dan tantangan zaman yang terus berubah. Anak muda hanya perlu dibimbing dan diberi masukan dan tidak salah arah. Masalahnya memang banyak pengelola Muhammadiyah yang enggan untuk memberi ruang kepada anak Muda dikarenakan pertimbangan politik. Kondisi semacam ini harus diubah karena kontra produktif dengan kebutuhan AUM dan Muhammadiyah. Dalam konteks pengembangan dan mendiasporakan kader muda yang menjadi guru, dosen atau karyawan di sekolah Muhammadiyah harus diarahkan kepada peningkatan kemampuan diri. Para dosen dan guru harus didorong untuk melanjutkan studi (S2 dan S3) bahkan untuk dosen didorong supaya bisa menjadi Guru besar. Sementara karyawan difasilitasi untuk mengembangkan diri dalam sektor administratif. Selain itu, fasilitas pendidikan yang meliputi sarana dan prasarana harus dipenuhi. Hal itu demi tercapainya pelayanan yang baik bagi para mahasiswa yang tengah menempuh studi di Perguruan Tinggi Muhammadiyah (Mursyidi & Malik, 2003).

## **2. Mengembangkan kembali dana komunitas**

Era awal berdirinya Muhammadiyah, Ahmad Dahlan membuat gempar tradisi masyarakat kebanyakan ketika itu. Pendekatan dakwah yang dilakukan sungguh melampaui zamannya. Terinspirasi pemikiran pembaharu Islam, Muhammad Abduh, di mana lembaga pendidikan merupakan langkah yang paling tepat untuk menyelesaikan persoalan masyarakat (Muqoyyidin, 2013). Kemudian Ahmad Dahlan mendirikan sebuah madrasah sebagai salah satu langkah konkret, hal itu dilakukan dengan mengandalkan tabungan pribadi untuk mewujudkannya. Yang kemudian berlanjut pada keterlibatan tokoh-tokoh untuk ikut 'urutan', karena dianggap langkah Ahmad Dahlan dalam mendirikan lembaga merupakan langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami umat kala itu. Ahmad Dahlan memang berbeda dengan tokoh-tokoh nasional pada zamannya yang fokus pada politik dan ekonomi, beliau mengabdikan diri sepenuhnya untuk pendidikan. Hal ini adalah bentuk perlawanan terhadap penjajahan Belanda melalui sekolah-sekolah modern sekuler yang mereka dirikan untuk menggeser eksistensi Pendidikan pesantren pada masa itu (Ali & Ali, 2004).

Pola dakwah kultural itu yang kemudian menjadikan Muhammadiyah memiliki budaya progresif dan otonomi yang mengakar sehingga tidak pernah bergantung kepada pihak manapun. Dengan memiliki budaya otonomi tersebut Muhammadiyah menjadi bebas untuk memilih staf dan mahasiswanya sendiri, mengembangkan standar kurikulum sendiri. Kurikulum baru yang dibawa Ahmad Dahlan memang membuat gempar rakyat Kauman, Yogyakarta kala itu, pandangan sesat atau bahkan kafir karena mempelajari ilmu umum justru dijawab beliau dengan mendirikan sekolah yang memadukan Pendidikan Islam dan Barat (Darsitun, 2020). Pendek kata, dengan sikap independen (otonomi) yang dimiliki oleh Muhammadiyah tersebut, ratusan sekolah dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah mampu bertahan sejauh ini (Mursyidi & Malik, 2003).

Pesan terakhir Ahmad Dahlan yang menjadi pesan suci, "*Hidup-hidupilah Muhammadiyah jangan engkau mencari hidup di Muhammadiyah.*" Hal ini kemudian menjadi prinsip para kader Muhammadiyah dalam mendirikan dan membesarkan Amal Usaha Muhammadiyah mulai dari level Pimpinan Ranting hingga Pimpinan Pusat (Ahmad, 2015). Prinsip itulah yang menjadi ruh dalam merawat sikap otonomi dan kemandirian para kader Muhammadiyah, maka jika sikap luhur tersebut sirna bukan tidak mungkin progresivitas sekolah dan perguruan tinggi Muhammadiyah akan terdistrupsi oleh perkembangan zaman dan dinamika politik kebangsaan. Jika merujuk pada filsafat Pendidikan Muhammadiyah, tujuan Pendidikan Muhammadiyah adalah mewujudkan pendidikan yang progresif di mana selalu berorientasi pada kemajuan yang memuat pengembangan kecerdasan personal dan penyelesaian persoalan sosial (Ali, 2016). Watak inklusif yang diwariskan Ahmad Dahlan juga mengakar kuat dalam diri warga Muhammadiyah hingga kini sehingga mereka mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Inklusif di sini dimaknai bahwa semua manusia memiliki sisi baik maka berbaik sangka kepada semua orang menjadi konsekuensinya (Gufron, 2014). Berangkat dari watak itu maka Muhammadiyah tidak canggung ketika mendirikan sekolah ataupun perguruan tinggi di daerah mayoritas Nasrani di Tanah Air karena memang Muhammadiyah memosisikan dirinya sebagai organisasi Islam yang inklusif (terbuka).

Budaya 'urunan' anggota itu pun mentradisi dalam tubuh Muhammadiyah hingga kini. Rata-rata sekolah Muhammadiyah bisa berdiri karena hasil iuran para anggotanya, baik itu setingkat PAUD-SD hingga perguruan tinggi. Semangat yang dimiliki para warga Muhammadiyah adalah *jihad fii sabilillah*. Mereka berkeyakinan bahwa mendirikan atau berjuang di lembaga Muhammadiyah merupakan perjuangan suci dan berbalas pahala yang kelak dipetik di akhirat. Doktrin *amar ma'ruf nahi munkar* menjadi landasan ideologi Muhammadiyah dan harus terpatri dalam hati warga Muhammadiyah. Sehingga menyebabkan AUM kian hari kian bertambah karena para pimpinan Muhammadiyah memiliki

semangat yang tinggi untuk memperjuangkannya. Bahkan dengan gaji kecil pun mereka tetap bertahan karena semangatnya bukan materi namun ibadah.

Dakwah kultural yang dikembangkan Muhammadiyah terbukti memiliki dampak signifikan terhadap terbangunnya rasa kolegalisme anggotanya. Misalnya, mendirikan sekolah dari hasil iuran anggota dan kemudian lembaga tersebut sukses menjadi lembaga besar bagi para warga Muhammadiyah adalah kebanggaan tersendiri. Sebagian besar warga Muhammadiyah beranggapan bahwa jihad yang paling tepat adalah melalui lembaga pendidikan bukan lewat jalan pedang atau perang, maka ada stigma bahwa warga Muhammadiyah hobi mendirikan sekolah. [Mursyidi & Malik \(2003\)](#) mengklaim bahwa dimana ada pimpinan Muhammadiyah di suatu tempat, biasanya akan berdiri sekolah Muhammadiyah, hal itu merupakan salah satu doktrin gerakan Muhammadiyah.

Sikap mandiri yang dimiliki warga Muhammadiyah berdampak pada sikap otonomi lembaga-lembaga amal Muhammadiyah. Sejauh ini lembaga Muhammadiyah tidak pernah menggantungkan diri terhadap pemerintah, lain halnya dengan sekolah-sekolah negeri atau sekolah swasta yayasan Islam lain yang sangat tergantung dengan pemerintah. Muhammadiyah bisa dikatakan terbebas dari intervensi pihak manapun dalam memutuskan kebijakan. Bahkan kurikulum nasional pun dimodifikasi, Muhammadiyah memiliki standar sendiri dalam hal pendidikan anak, khususnya berkenaan dengan pembinaan akidah (agama) peserta didik hingga gurunya ([Ahmad, 2015](#)). Hal ini dilakukan salah satunya dengan adanya pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyah di setiap lembaga pendidikan Muhammadiyah. Tujuannya supaya semua lulusan dari sekolah Muhammadiyah selain unggul dalam ilmu umum mereka juga memiliki akidah yang kuat ([Daulai, 2020](#)). Lebih lanjut, semua guru, karyawan dan siswa diwajibkan mengikuti kajian-kajian mingguan atau bulanan dan *Darul Arqom* yang diselenggarakan Pimpinan Muhammadiyah (Ranting, Cabang, Daerah) sebagai upaya penguatan pemahaman tentang gerakan Muhammadiyah. Selain untuk misi ideologisasi bagi warga Muhammadiyah, hal itu juga dimaksudkan untuk membuka wawasan keilmuan, wawasan sosial, kemampuan dan profesionalitas mereka ([Mursyidi & Malik, 2003](#)).

Namun demikian, kondisi saat ini agak berbeda. Keterlibatan pihak lain (di luar warga Muhammadiyah) terkhusus partai politik dalam mengembangkan sekolah Muhammadiyah sedikit-banyak mempengaruhi pola pikir warga Muhammadiyah. Pola pikir yang dimaksud adalah berkenaan dengan pandangan terhadap sikap kolegalisme. Pandangan sebagian pengelola sekolah Muhammadiyah dalam mendefinisikan kolegalisme mengalami perubahan, sebelumnya kolegalisme hanya dalam ranah hubungan anggota Muhammadiyah. Namun, saat ini kolegalisme itu berkembang menjadi hubungan antara anggota Muhammadiyah dengan pihak lain, termasuk partai politik. Sehingga banyak

kepala sekolah Muhammadiyah yang semakin intens berkomunikasi dengan anggota DPR dari partai politik tertentu bahkan tidak segan untuk terlibat dalam proses kampanye saat pemilu. Mereka berharap akan “panen” ketika caleg yang didukung memenangi pemilu. Kepala sekolah bahkan tidak segan memberi instruksi secara terbuka kepada guru dan wali murid untuk turut serta memberikan dukungan.

Politik sebagai bentuk dakwah struktural memang memiliki pengaruh yang signifikan dalam memajukan Amal Usaha Muhammadiyah, bahkan secara tegas [Nata \(2003\)](#) mengatakan bahwa pendidikan tidak bisa dipisahkan dari campur tangan politik. Sejauh ini dinamika dalam dunia pendidikan Indonesia tidak bisa terlepas dari peran penguasa, demikian halnya dengan Muhammadiyah. Dalam kaitan ini, [Nata \(2003\)](#) mengistilahkan apa yang disebut dengan “politik pendidikan”. Sebetulnya sah-sah saja jika Muhammadiyah menjalin hubungan dekat dengan pihak manapun termasuk partai politik, namun yang menjadi catatan [Mursyidi & Malik \(2003\)](#) adalah dengan siapapun Muhammadiyah menjalin kedekatan harus menguntungkan Muhammadiyah. Namun demikian, jika tidak berhati-hati dalam melangkah kondisi seperti ini dapat mengancam sikap kemandirian (otonomi) Muhammadiyah dalam mengelola gerakan dakwahnya.

Sikap totalitas yang ditunjukkan pengelola sekolah Muhammadiyah itu muncul disebabkan oleh ketidakmampuan persyarikatan dalam mencukupi kebutuhan sekolahnya. Maka mereka mencari jalan alternatif supaya roda lembaga tetap berjalan, terlebih lagi jika berkenaan dengan pembangunan gedung baru, budaya iuran Pimpinan Muhammadiyah jelas tidak akan mencukupi maka perlu keterlibatan pihak-pihak lain di luar Muhammadiyah. Hal itu berdampak pada sikap otonomi (bebas bersikap) pengelola sekolah Muhammadiyah. Dahulu Muhammadiyah begitu perkasa dalam bersikap, tanpa intervensi pihak manapun namun kini tidak bisa. Sebab terikat dengan ketentuan pihak lain yang dianggap berjasa.

Sebagai contoh adalah pembangunan masjid Ibrahim Al Mathrud di SD Muhammadiyah 1 Mantingan, Kabupaten Ngawi. Masjid itu berdiri di tanah wakaf PCM Mantingan-Ngawi, namun dikarenakan ketidakmampuan PCM membangun masjid dengan dana sendiri maka harus meminta bantuan dari yayasan Timur-Tengah. Syarat utama dana itu bisa dicairkan jika model, ukuran, bahkan interior masjid sesuai dengan kehendak pemberi dana. Di sini Muhammadiyah bisa dikatakan kehilangan sikap otonominya karena ada keterikatan dengan pihak lain. Contoh lain adalah adanya PIP (Program Indonesia Pintar) jalur partai politik, maka sekolah harus siap dijadikan tempat kampanye para anggota legislatif sebagai wujud timbal balik. Meskipun sikap seperti itu bisa dikatakan tidak tepat tetapi kondisi yang dihadapi oleh sekolah-sekolah Muhammadiyah memaksa harus berbuat demikian.



Keterlibatan pihak lain, terlebih partai politik dalam pengembangan sekolah-sekolah Muhammadiyah memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, mampu menjadi langkah efektif dan efisien dalam pengembangan sekolah. Artinya, dengan proses yang mudah dan cepat gedung-gedung sekolah mampu tegak berdiri tanpa adanya kesulitan finansial dari anggotanya. Sementara dampak negatif dari keterlibatan pihak di luar Muhammadiyah berakibat pada ketidakmampuan sekolah Muhammadiyah dalam bersikap. Meskipun Muhammadiyah tidak bisa dibeli (Istilah Abdul Mu'thi, Sekeretaris Umum PP Muhammadiyah), namun faktanya di akar rumput Muhammadiyah seolah menjadi gagap untuk menyampaikan kritiknya terhadap pemerintah (legislatif/eksekutif) karena Muhammadiyah masih membutuhkan uluran tangan pemegang kebijakan.

Sikap otonomi yang selama ini dimiliki oleh Muhammadiyah agaknya terancam oleh ketidakmampuan Muhammadiyah dalam hal finansial terlebih pada tingkat ranting dan cabang. Hal itu diperparah manakala Muhammadiyah menjadi minoritas di wilayah tersebut. Sampai saat ini belum ada kebijakan tertulis tentang program subsidi silang lintas AUM atau manajemen terintegrasi antar-AUM. Semua berjalan sesuai improvisasi pimpinan, sebut saja Muhammadiyah Gresik dan Surabaya, sebagian sekolah di sana sudah menerapkan “manajemen terintegrasi dan terpusat”. Di mana keuangan semua sekolah terpusat di Pimpinan Daerah Muhammadiyah ataupun Pimpinan Cabang Muhammadiyah sehingga sistem gaji dan pengembangan sekolah sangat terkontrol. Hasilnya terjadi penyetaraan kualitas sekolah-sekolah Muhammadiyah di sana. Sistem subsidi silang yang diterapkan di sana mampu menjadi penopang sekolah yang masih tahap berkembang sehingga menjadi sekolah mandiri. Maka perlu diadakan modernisasi amal usaha Muhammadiyah dalam segala sektor, mulai dari kurikulum, manajerial hingga *grand design* sekolah Muhammadiyah ke depan (Daulai, 2020).

### 3. Pendirian dan penguatan unit bisnis penopang

Ahmad Dahlan mewariskan semangat *tajdid* pada setiap lahan dakwahnya, termasuk bidang pendidikan. Oleh karenanya, Lembaga Pendidikan Muhammadiyah harus terus berubah dan berbenah. Muhammadiyah meyakini bahwa hanya jika seseorang beriman dan berilmu pengetahuan mereka akan mencapai derajat tinggi di hadapan Allah Swt (Rusydi, 2016). Semangat *tajdid* itu sebetulnya telah dicontohkan oleh para tokoh Muhammadiyah pada era awal berdirinya persyarikatan ini, di mana saat itu begitu kental pendidikan Islam tradisional yang bersifat eksklusif dan dogmatis kemudian atas inisiatif Ahmad Dahlan konsep pendidikan Islam itu diubah lebih modern dengan jalan memadukan model pendidikan pesantren (tradisional) dengan pendidikan umum (Abdullah, 2014). Intervensi kolonial Belanda saat itu begitu kuatnya terhadap

eksistensi pendidikan Islam (pesantren), ditambah tidak semua rakyat mampu mengenyam pendidikan di bawah kekuasaan Belanda karena memang bagi Belanda pendidikan bukan hanya bersifat pedagogis-kultural tetapi juga pedagogis-politis maka bisa mengancam posisinya manakala umat Islam memperoleh pendidikan yang layak (Mubin & Aziz, 2020). Tetapi Ahmad Dahlan tetap kuat dalam pendiriannya, dan sifat itulah yang agaknya diharapkan beliau kepada para kader Muhammadiyah.

Namun demikian, dalam konteks sikap otonomi Amal Usaha Muhammadiyah khususnya bidang pendidikan mesti ada pembenahan, sehingga Muhammadiyah betul-betul tidak bisa dibeli ataupun diintervensi pihak manapun terlebih lagi partai politik. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan memperbanyak Amal Usaha yang berorientasi pada penguatan finansial lembaga pendidikan. Manajemen Sekolah Muhammadiyah bisa mengaplikasikan konsep *knowledge-base economy* yang ditawarkan Bambang Setiaji, hal itu bertujuan agar Amal Usaha Muhammadiyah mampu mencukupi kebutuhannya sendiri bahkan tidak bergantung dari seberapa banyak Mahasiswa/ siswa yang hendak mendaftar (Mursyidi & Malik, 2003). Seperti halnya yang dilakukan oleh pondok pesantren Gontor saat ini. Mereka berprinsip, uang dari santri harus kembali ke santri, uang tidak boleh keluar dari pondok. Prinsip itu kemudian diterjemahkan dalam langkah konkret dengan mendirikan semacam mini market santri, yang dikelola oleh pondok untuk mencukupi kebutuhan santri dan pengajarnya. Bahkan air mineral dan beberapa jenis makanan ringan pun mereka memproduksi sendiri. Prinsipnya sebisa mungkin segala kebutuhan santri disediakan oleh Gontor dengan kualitas dan harga yang sama seperti di luar pondok sehingga tidak ada alasan bagi santri dan pengajar untuk mencari kebutuhannya di luar pondok.

Pola yang sama bisa diterapkan oleh sekolah-sekolah Muhammadiyah supaya bisa memegang budaya kolegalisme dan otonominya. Sekolah-sekolah Muhammadiyah harus berinovasi untuk menambah sumber pembiayaan pendidikan. Seperti yang dilakukan oleh SD Muhammadiyah 1 Ngawi dengan mendirikan kantin sehat, katering sekolah, EO kegiatan-kegiatan besar, Les privat dan sebagainya. SD Muhammadiyah 4 Malang juga sudah mengawali dengan membuat produk unggulannya yakni dengan memproduksi jamu beras kencur yang dipasarkan kepada wali murid dan lingkungan. Sementara tingkat Perguruan Tinggi, bisa mencontoh Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), di sana sudah berdiri SPBU, Rumah Sakit, Hotel, wisata kuliner, tempat rekreasi dan *home stay* sehingga UMM bisa menjadi kampus yang mandiri. Bahkan mengenai dana pensiun para Dosen dan Karyawan sudah masuk dalam rencana jangka panjangnya. Prinsipnya semakin banyak inovasi yang dilakukan dalam upaya menambah sumber pembiayaan pendidikan, maka langkah konkret menuju sekolah mandiri akan terwujud. Dengan demikian, Muhammadiyah tetap bisa

menjaga budaya kolegalisme dan otonominya yang telah mendarah daging dalam tubuh persyarikatan selama ini.

#### 4. Berjarak dengan politik dan kekuasaan

Dalam pandangan penulis, akan menjadi ancaman jika Muhammadiyah terlalu berdekatan dengan penguasa. Sebab dalam kondisi tertentu Muhammadiyah akan kelu lidahnya untuk berbicara lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sejalan dengan amanat konstitusi. Tawaran supaya Muhammadiyah terlibat aktif dalam percaturan politik praktis sepertinya belum begitu dibutuhkan sejauh ini. Toh, sikap tegas Muhammadiyah bahwa ia bukan partai politik dan bukan bagian dari partai politik masih saja ada partai tertentu yang ikut mengintervensi proses dakwah Muhammadiyah. Yang mana kondisi tersebut juga berpengaruh cukup besar pada perahu Muhammadiyah. Contoh kasus, ketika Musyawarah pemilihan pimpinan Organisasi Otonom (ortom) Muhammadiyah setingkat provinsi dan pusat, di sana sangat nampak keterlibatan partai politik tertentu dalam suksesi sehingga lagi-lagi sikap otonomi Muhammadiyah masih terbelenggu oleh hutang budi. Perang para senior yang duduk di parlemen begitu nampak sehingga tidak jarang terjadi konflik horizontal antar-kader Muhammadiyah. Mulai ada kecenderungan pihak oposisi dalam tubuh ortom Muhammadiyah dan hal itu tidak baik sebab selama ini Muhammadiyah memegang prinsip kolegalisme dalam berdakwah, artinya musyawarah mufakat yang dikedepankan. Jika sudah terjadi kecenderungan membawa kebiasaan politik praktis dalam tubuh ortom Muhammadiyah maka bukan tidak mungkin suatu saat arus ini akan bermuara pada tataran pemilihan Pimpinan Muhammadiyah.

#### KESIMPULAN

Perlu ada alternatif-alternatif baru dalam mendakwahkan Islam melalui Muhammadiyah pada usianya yang tengah masuk abad kedua ini. Tentu, inovasi itu harus dengan mempertahankan prinsip progresifisme, kolegalisme dan otonomi. Solusi yang ditawarkan disini antara lain: (1) melakukan peremajaan pimpinan Muhammadiyah dan pengelola AUM, (2) membangun jarak dengan politik (*real/low politic*) dan kekuasaan, (3) mengembangkan dana komunitas, dan (4) membangun unit-unit bisnis penopang. Pendidikan politik sebagai upaya merumuskan teologisasi politik bagi warga Muhammadiyah juga dibutuhkan supaya kapal besar Muhammadiyah tidak terbelah karena perbedaan sikap politik dan semakin mampu berkontribusi kepada politik dalam aras lokal-nasional tanpa mengorban integritas pribadi sebagai organisasi gerakan dan organisasi amalan.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, C. (2014). Tradisi Pesantren Sebagai Pusat Peradaban Muslim Nusantara. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 11(2), 17–37.
- Ahmad, F. (2015). Pemikiran KH Ahmad Dahlan Tentang Pendidikan dan Implementasinya di SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta Tahun 2014/2015. *Profetika Jurnal Studi Islam*, 16(2), 144–154.
- Ali, M. (2016). Membedah Tujuan Pendidikan Muhammadiyah. *Profetika Jurnal Studi Islam*, 17(01), 43–56.
- Ali, M., & Ali, M. (2004). Filsafat Pendidikan Muhammadiyah: Tinjauan Historis dan Praksis. *Tajdid: Jurnal Pemikiran dan Gerakan Muhammadiyah*, 2(2), 123–40.
- Asyari, S. (2015). *Nalar Politik NU dan Muhammadiyah*. LKIS Yogyakarta.
- Darsitun. (2020). Potret Pendidikan Islam Model Muhammadiyah dan Perannya dalam Pengembangan Pendidikan Islam Indonesia. *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(01), 01–18.
- Daulai, A. F. (2020). Modernisasi Pendidikan pada Muhammadiyah. *TAZKIYA*, 8(2).
- Edwinarta, C. D., & Dwijayanti, R. (2016). Komunikasi Politik Elit NU dan Muhammadiyah dalam Pilkada Kediri. *Jurnal Kajian Media*, 2(1).
- Gufron, A. (2014). Inklusifisme Islam di Indonesia. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 11(1), 1–13.
- Harvey, L. (1995). The New Collegialism: Improvement with Accountability. *Tertiary Education & Management*, 1(2), 153–160.
- Husin, S. A. (2001). *Muhammadiyah Dalam Kritik*. Muhammadiyah University Press.
- Maassen, P., Gornitzka, A., & Fumasoli, T. (2017). University Reform and Institutional Autonomy: A Framework for Analysing the Living Autonomy. *Higher Education Quarterly*, 71(3), 239–250.
- Marini, G., & Reale, E. (2016). How Does Collegiality Survive Managerially Led Universities? Evidence from a European Survey. *European Journal of Higher Education*, 6(2), 111–127.
- Mubin, F., & Aziz, A. (2020). Politik Pendidikan Islam Indonesia: Perlawanan Pesantren Terhadap Hegemoni Pendidikan Barat Era Kolonialisme Belanda. *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam*, 3(1), 123–136.
- Mulkhan, A. M. (2010). *Marhaenis Muhammadiyah*. Galang Press.
- Mulkhan, A. M., Hefner, R. W., & Sukidi. (2008). *Api Pembaharuan Kiai Ahmad Dahlan*. Multi Presindo.
- Muqoyyidin, A. W. (2013). Pembaruan Pendidikan Islam Menurut Muhammad Abduh. *Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati*, 28(2), 287–306.
- Mursyidi, A., & Fadjar, A. M. (2003). *Mencari Format Baru Pengembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah*. Majelis Diklitbang PP Muhammadiyah.
- Nashir, H. (2006). *Dinamika Politik Muhammadiyah*. UMM Press.
- Nashir, H., Qodir, Z., Nurmandi, A., Jubba, H., & Hidayati, M. (2019). Muhammadiyah's Moderation Stance in the 2019 General Election: Critical Views from Within. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 57(1), 1–24.
- Nasri, I. (2010). *Meremajakan Pimpinan Muhammadiyah*. Suara Muhammadiyah.

- Nata, A. (2003). *Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam Indonesia*. Prenata Media.
- Nurmandi, A. & Qodir, Z. (2015). *Ijtihad Politik Muhammadiyah: Politik Sebagai Amal Usaha*. Pustaka Pelajar.
- Pilkington, A., Winch, C., & Leisten, R. (2001). The Limits of Managerialism and the Need for Collegialism in Assessment: the Case of Dissertations in Sociology. In *Assessing Sociologists in Higher Education*. Routledge.
- Prihantoro, H. A. (2017). Revitalisasi Nalar Hukum Islam: Dari Gerakan Politik Menuju Kesadaran Etik. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 14(1), 91–116.
- Rahman, A., & Wulandari, S. (2019). Kepentingan Politik Masyumi dalam Tafsir Annur Karya Tengku Muhammad Hasbi Ashshiddieqy. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat*, 16(2), 137–160.
- Rusydi, R. (2016). Peran Muhammadiyah (Konsep Pendidikan, Usaha-Usaha di Bidang Pendidikan, dan Tokoh). *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(2):139–148.
- Sholikin, A. (2020). Dinamika Hubungan Muhammadiyah dan Partai Politik di Indonesia. *Jurnal Polinter: Kajian Politik dan Hubungan Internasional*, 5(2), 1–19.
- Syaifuddin, M. A., Anggraeni, H., Khotimah, P. C., & Mahfud, C. (2019). Sudah Sejarah Sosial Pendidikan Islam Modern Di Muhammadiyah. *Tadarus*, 8(1).
- Taufik, A., Maunah, B., & Huda, M. D. (2005). *Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam*. PT. Raja Grafindo.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License